

---

---

## **PENGARUH PENGELUARAN DANA PENDIDIKAN, DANA KESEHATAN, DANA INFRASTRUKTUR TERHADAP TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT) DI PROVINSI GORONTALO**

(Nurain Pakaya<sup>1</sup>, Muhammad Amir Arham<sup>2</sup>, Frahmawati Bumulo<sup>3</sup>)

Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Gorontalo,

Jl. Jend. Sudirman No.6, Dulalowo Tim., Kec. Kota Tengah, Kota Gorontalo, Indonesia

Email : [Nurainpakaya200@gmail.com](mailto:Nurainpakaya200@gmail.com)

---

**Abstract:** This study aims to determine the effect of government spending on education, health, and infrastructure funds on the open unemployment rate in Gorontalo Province. The data used in this research are secondary data based on Statistics Indonesia and the Directorate General of Fiscal Balance (DJPK). The method of study applies Panel Data Multiple Linear Regression analysis in the 2011-2021 periods of 6 regencies/cities.

The results of the analysis show that government spending on education has a positive and significant effect on open unemployment in Gorontalo Province. This indicates that any increase in government spending on education will increase open unemployment in Gorontalo Province. Meanwhile, government spending on health has a negative and significant effect on open unemployment in Gorontalo Province. This indicates that any increase in government spending on health will be followed by a decrease in open unemployment in Gorontalo Province. Lastly, government spending on infrastructure has a positive but not significant effect on open unemployment in Gorontalo Province. This indicates that any increase in government spending on infrastructure will not necessarily reduce open unemployment in Gorontalo Province.

**Keywords:** Open Unemployment Rate (TPT); Education; Health; and Infrastructure Funds Spending.

---

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Infrastruktur Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Gorontalo. Data yang digunakan dalam penelitian yaitu data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK). Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis Regresi Linier Berganda Data Panel, pada periode 2011-2021 di 6 Kabupaten/kota.

Hasil analisis menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah bidang pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengangguran terbuka di Provinsi Gorontalo. Artinya, setiap kenaikan pengeluaran pemerintah bidang pendidikan akan meningkatkan pengangguran terbuka di Provinsi Gorontalo. Pengeluaran pemerintah bidang kesehatan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengangguran terbuka di Provinsi Gorontalo. Artinya, setiap kenaikan pengeluaran pemerintah bidang kesehatan akan diikuti dengan menurunnya pengangguran terbuka di Provinsi Gorontalo, dan pengeluaran pemerintah bidang infrastruktur berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap pengangguran terbuka di Provinsi Gorontalo. Artinya, setiap kenaikan pengeluaran pemerintah bidang infrastruktur belum tentu dapat mengurangi pengangguran terbuka di Provinsi Gorontalo.

**Kata Kunci:** Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT); Pengeluaran Dana Bidang Pendidikan; Kesehatan; dan Infrastruktur.

### **PENDAHULUAN**

Pembangunan adalah proses multidimensi yang mencakup perubahan mendasar pada struktur sosial, sikap warga negara dan institusi nasional. Pembangunan dapat dikatakan berhasil apabila mampu meningkatkan kesejahteraan dalam arti luas (Siti, Teguh, Laila, 2022). Pengaruh kondisi penduduk dengan kualitas yang baik akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan sebaliknya penduduk dengan kualitas yang rendah akan menjadi beban pembangunan (Sri Maryati, 2015).

Pembangunan ekonomi suatu wilayah atau negara pada dasarnya merupakan interaksi berbagai kelompok variabel antara lain sumber daya manusia, sumber daya alam, modal, teknologi dan lain-lain. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi tidak lepas dari peran manusia dalam mengelolanya. Dimana manusia adalah tenaga kerja, input pembangunan, juga konsumen dari hasil pembangunan itu sendiri. Salah satu tujuan penting dalam pembangunan ekonomi adalah penyediaan lapangan kerja yang cukup untuk menjejakan pertumbuhan angkatan kerja, yang pertumbuhannya lebih cepat dari pertumbuhan kesempatan kerja. Masalah kesempatan kerja merupakan masalah penting dalam makro ekonomi karena tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi selain modal dan teknologi (Yulia Pangastuti, 2017).

Di Indonesia Pembangunan nasional tidak dapat dipisahkan dari pembangunan daerah, karena wilayah Indonesia terdiri dari provinsi, kabupaten/kota, dan daerah-daerah yang lebih kecil. Kegiatan pembangunan yang akan direncanakan dan dilaksanakan harus dapat menjangkau dan dirasakan oleh masyarakat kecil.

Ketenagakerjaan merupakan aspek yang amat mendasar dalam kehidupan manusia karena mencakup dimensi sosial dan ekonomi. Faktor tenaga kerja selaku bagian dari sumber daya manusia (SDM) pada masa pembangunan nasional tercantum aspek yang teramat penting untuk keberhasilan terselenggaranya pembangunan nasional di Indonesia (Nur Herawati, 2013). Pemanfaatan jumlah angkatan kerja pasti akan sanggup mempercepat pembangunan serta perkembangan nasional. Secara tradisional perkembangan penduduk serta angkatan kerja dikira sebagai salah satu aspek yang berpengaruh positif dalam memacu pembangunan nasional serta perkembangan ekonomi. Indonesia yang merupakan negara berkembang ialah salah satu dari banyak negara yang mempunyai permasalahan mengenai tenaga kerja (Gatiningsi, Eko Sutrisno, 2017).

Masalah yang dimaksud adalah masalah mengenai tingginya angka pengangguran, dimana diketahui bahwa pengangguran merupakan masalah yang membatasi proses pembangunan. Masalah ketenagakerjaan merupakan masalah yang sangat luas dan kompleks. Masalah pengangguran muncul sebagai akibat dari jumlah tenaga kerja yang tidak seimbang dengan jumlah permintaan pekerjaan yang ada. Ketidakmampuan negara untuk mengurangi peningkatan angka pengangguran merupakan masalah serius bagi pemerintah maupun masyarakat. Perumusan kebijakan yang dapat mendorong perluasan lapangan kerja perlu

diupayakan agar perangkat dalam kebijakan ekonomi dapat secara efisien mengurangi pengangguran (I Gusti Agung, Ketut Suardhika, 2015).

Keberhasilan suatu pemerintahan dalam hal pembangunan dapat dinilai dari sejauh mana pemerintah dapat menciptakan dan menambah lapangan pekerjaan serta mengurangi jumlah pengangguran, meningkatnya lapangan pekerjaan baru dan semakin banyak maka akan berdampak pada penyerapan tenaga kerja yang ada (Yuniandini, Hendrati, Asmara, 2020).

Jika dilihat dari tingkat tenaga kerja di Indonesia, ada beberapa provinsi yang masih sangat tinggi angka pengangguran dan tingginya angka tenaga kerja. Salah satunya adalah provinsi Gorontalo yang terdiri dari 6 Kabupaten/Kota dan merupakan salah satu provinsi termuda di Indonesia. Perkembangan tenaga kerja Provinsi Gorontalo dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1 Kondisi umum ketenagakerjaan di Provinsi Gorontalo Tahun 2011-2021**

Tahun	Indikator Ketenagakerjaan dalam persen (%)		
	Tingkat Pengangguran Terbuka	Tingkat Kesempatan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
2011	6.68	93.32	64.03
2012	4.44	95.56	62.59
2013	4.15	95.85	61.46
2014	4.18	95.82	62.84
2015	4.65	95.35	63.65
2016	2.76	97.24	67.89
2017	4.28	95.72	64.78
2018	4.03	95.97	67.34
2019	4.06	95.94	66.83
2020	3.59	96.41	66.76
2021	3.01	0	65.94

(Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Gorontalo)

Dari Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa tingkat pengangguran terbuka (TPT) tertinggi yaitu pada tahun 2011 yang mencapai 6.68 persen sedangkan yang terendah pada tahun 2016 2.76 persen. Kondisi tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Gorontalo cenderung menurun itu terlihat pada tahun 2016 tingkat pengangguran mencapai 2.76 persen dan pada tahun 2017 naik menjadi 4.28 persen. Sedangkan ditahun 2020 tingkat pengangguran terbuka turun dari yang sebelumnya ditahun 2019 4.06 persen menjadi 3.59 persen. Untuk tingkat partisipasi angkatan kerja tertinggi pada tahun 2016 67.89 persen dan terendah di tahun 2013 61.46 persen. Begitupun dengan tingkat kesempatan kerja yang tertinggi adalah ditahun 2016 97.24 persen dan yang terendah ditahun 2011 93.32 persen.

Pengangguran terjadi karena jumlah lapangan kerja yang berlaku lebih kecil dari jumlah pencari kerja. Selain itu juga karena kemampuan yang dimiliki para pencari kerja tidak sesuai dengan pasar kerja. Pengangguran juga berkaitan erat dengan terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) yang disebabkan karena perusahaan yang menutupi atau mengurangi bidang usahanya akibat krisis ekonomi atau keamanan yang kurang kondusif, peraturan yang menghambat investasi serta adanya hambatan dalam proses ekspor impor (Soraya, Syamsul, Dewi, 2019).

Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah, atau lebih umum merupakan ukuran sektor publik, merupakan subjek penting untuk analisis dan diperdebatkan (Alisman, 2015). Kekuatan pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap rakyat harus mampu mengidentifikasi sektor-sektor prioritas pembangunan seperti pendidikan, kesehatan dan kesempatan kerja yang memiliki potensi tertinggi untuk meningkatkan pembangunan manusia. Pengeluaran pemerintah sendiri merupakan alat intervensi pemerintah terhadap perekonomian yang dianggap paling efektif (Pratiwi& Indrajaya, 2019).

Pemerintah memiliki dua kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, baik kebijakan moneter maupun kebijakan fiskal. Kebijakan moneter merupakan salah satu kebijakan pemerintah dalam menekan jumlah uang yang beredar di masyarakat, sedangkan kebijakan fiskal merupakan salah satu kebijakan pemerintah dalam menentukan pengeluaran dan pendapatan untuk mencapai tingkat penyerapan tenaga kerja yang tinggi. Pengeluaran pemerintah sendiri merupakan bagian dari kebijakan fiskal yaitu merupakan suatu tindakan mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan serta pengeluaran pemerintah pada tiap tahunnya yang tercermin dalam dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk nasional dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk daerah atau regional (Nurul, 2017).

Penerapan kebijakan desentralisasi fiskal telah diterapkan oleh pemerintah sejak lama yaitu dengan di tetapkannya UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, serta UU No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dengan diterapkannya otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah diberi wewenang oleh pemerintah pusat untuk mengatur dan melaksanakan urusan pemerintahan daerah dengan mengelola penerimaan dan pengeluaran daerah, dengan begitu setiap daerah diharapkan mampu membangun daerahnya sendiri serta memacu pertumbuhan ekonomi (Nurul, 2017)

Pengembangan sumber daya manusia dapat dilakukan menggunakan perbaikan kualitas modal manusia. Modal manusia dapat mengacu pada pendidikan, namun juga dapat digunakan untuk menjelaskan jenis investasi manusia lainnya yaitu investasi yang mendorong ke arah populasi yang sehat yaitu kesehatan. Pendidikan dan kesehatan merupakan tujuan pembangunan yang mendasar pada suatu wilayah. Kesehatan adalah inti dari kesejahteraan, serta pendidikan ialah hal yang utama untuk mencapai kehidupan yang layak. Pendidikan memiliki peran yang penting dalam membentuk kemampuan sebuah negara berkembang untuk menyerap teknologi modern dan untuk mengembangkan kapasitas agar tercipta pertumbuhan dan pembangunan yang berkelanjutan (Riyan, Rosalina, Josep, 2019).

Di negara berkembang, rendahnya produktivitas yaitu bersumber dari lemahnya kesehatan fisik para pekerja. Jadi karena hal inilah pemerintah harus memperhatikan pengeluaran untuk fungsi kesehatan yaitu memberikan pelayanan kesehatan yang lebih merata kepada masyarakat, sehingga sumber daya manusia yang sehat akan semakin bertambah. meningkatnya kesehatan akan mendorong peningkatan produktivitas tenaga kerja sehingga bisa menghasilkan output yang lebih besar. Ini akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi (Christiana, 2011).

Peningkatan kualitas modal manusia bergantung pada ketersediaan infrastruktur untuk mendukung investasi sumber daya manusia. Perumahan dan transportasi merupakan barang publik yang dapat disediakan oleh pemerintah dalam rangka

memenuhi kebutuhan masyarakat. Ketersediaan perumahan yang layak akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat karena rumah yang layak dapat menunjang kesehatan dan pada akhirnya akan meningkatkan produktivitas sumber daya manusia. Jaringan transportasi yang terintegrasi dengan baik akan memudahkan pemerataan kegiatan ekonomi dan dalam jangka panjang dapat menjadi media pemerataan pembangunan (Mardiana, Militina & Utary, 2017).

Pengeluaran pemerintah untuk pendidikan, kesehatan dan infrastruktur pada dasarnya merupakan investasi dalam pertumbuhan ekonomi. Dampak pembangunan pada ketiga sektor tersebut tidak dapat berdampak langsung tetapi memerlukan beberapa periode untuk dapat merasakan dampaknya. Terdapat jeda waktu ketika pemerintah mengeluarkan anggaran pembangunan atau belanja negara untuk ketiga sektor tersebut sebagai dampak dari kebijakan tersebut, sehingga diperlukan studi dengan menggunakan runtut waktu yang cukup panjang. Penelitian dengan menggunakan runtut waktu akan membantu untuk melihat pengaruh pengeluaran pemerintah pada ketiga sektor tersebut terhadap pertumbuhan ekonomi (Desi Dwi Bastias, 2010).

Investasi pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur akan mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia dan infrastruktur fisik, juga akan memacu investasi ekonomi. Investasi ekonomi kemudian akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, karena besarnya jumlah modal yang tersedia untuk pembangunan (Heri Suparno, 2014). Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu jenis kebijakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah sebagai langkah untuk mensejahterakan rakyatnya dan menuju pertumbuhan ekonomi. Pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur merupakan bagian dari pengeluaran pemerintah yang memacu kesejahteraan masyarakat dan pada akhirnya mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

Pengeluaran pembangunan di bidang pembangunan dapat dialokasikan untuk penyediaan prasarana pendidikan dan pelayanan pendidikan kepada seluruh penduduk secara merata. Anggaran pemerintah untuk pendidikan sebesar 20% (persen) merupakan wujud realisasi dari pemerintah untuk meningkatkan pendidikan. Investasi di bidang pendidikan mutlak diperlukan, sehingga pemerintah harus mampu membangun sarana dan sistem pendidikan yang baik. Alokasi anggaran pemerintah untuk pendidikan merupakan wujud nyata dari investasi untuk meningkatkan produktivitas masyarakat (Susen, George, Antonius, 2018).

Pemerintah harus dapat menjamin hak masyarakat untuk sehat (*right for health*) dengan memberikan pelayanan kesehatan secara adil, merata, memadai, terjangkau, dan berkualitas. Hampir semua negara-negara maju di dunia menaruh perhatian yang serius terhadap masalah kesehatan. Sebagai contoh, pemerintah Inggris melalui *National Health Service* (NHS) memberikan subsidi kesehatan kepada masyarakatnya hingga 90%. Dengan sistem seperti itu masyarakat dapat menikmati pelayanan kesehatan yang sangat murah. Masyarakat hanya menanggung biaya perawatan kurang dari 5% dari total biaya, karena sebagian besar biaya ditanggung pemerintah, sebagian lagi berasal dari donasi, baik dari pribadi maupun perusahaan-perusahaan (widiastuti, 2017).

Infrastruktur menjadi roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Dari alokasi pembiayaan publik dan swasta, infrastruktur dilihat sebagai lokomotif pembangunan nasional dan daerah. Infrastruktur juga berperan penting dalam peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia, antara lain dalam peningkatan nilai konsumsi, peningkatan produktivitas tenaga kerja dan akses kesempatan kerja, serta peningkatan kesejahteraan nyata. Infrastruktur juga memiliki pengaruh penting dalam meningkatkan nilai konsumsi, meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan akses lapangan kerja (Atmaja & Mahalli, 2015).

Menurut (Junaidi & Zulfanetti, 2016), pengangguran terbuka selalu terjadi pada generasi muda yang baru selesai dari pendidikan menengah dan tinggi. Ada kecenderungan mereka mau berusaha untuk mencari kerja sesuai dengan kemauan mereka. Kemauan mereka ini biasanya untuk bekerja di sektor modern atau dikantor. Untuk mendapatkan pekerjaan itu mereka akan bersedia menunggu beberapa lama. Bukan hal yang tidak mungkin mereka pasti akan berusaha mencari pekerjaan di kota, provinsi atau di daerah yang kegiatan industrinya sudah berkembang. Ini yang membuat angka pengangguran terbuka cenderung cukup tinggi di kota atau daerah tersebut. Sebaliknya angka pengangguran terbuka terlihat rendah didaerah atau di provinsi yang kegiatan ekonominya masih bertumpu pada sektor tradisional, apalagi jika angka pendidikan didaerah tersebut masih rendah (Syahputra, Erfit & Nurhayani, 2019).

Sedangkan pengertian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah presentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja (BPS, 2022).

Menurut (Badan Pusat Statistik, 2022) Penganggur terbuka, terdiri dari:

1. Mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan.
2. Mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha.
3. Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan.
4. Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Penelitian terdahulu yang meneliti pengaruh pengeluaran dana pendidikan, dana kesehatan, dana infrastruktur terhadap tingkat pengangguran terbuka yaitu diantaranya (Mardiana, Theresia Militina & Anis Rachma Utary, 2017), (Angga Syahputra, Erfit & Nurhayani, 2019), (Syurifto Prawira, 2018), (Roby Cahyadi Kurniawan, 2013). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pengeluaran dana pendidikan, dana kesehatan, dana infrastruktur terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Gorontalo. Hasil penelitian ini di harapkan dapat menjadi masukan kepada pemerintah dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang terkait dengan pengeluaran guna meningkatkan pertumbuhan tenaga kerja yang baik agar berkurangnya pengangguran.

## **METODE PENELITIAN**

### **Lokasi dan Waktu Penelitian**

Lokasi dalam penelitian ini adalah seluruh wilayah Provinsi Gorontalo dengan jangka waktu dari bulan Agustus sampai dengan selesai. Objek penelitian ini yaitu dana pemerintah untuk pendidikan, dana pemerintah untuk kesehatan dan infrastruktur dan tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Gorontalo.

### **Pendekatan dan Desain Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Metode kuantitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel ini dilakukan secara acak, pengumpulan data yang menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2018).

### **Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi non-perilaku, dimana peneliti adalah seorang pengamat independen. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah dengan mengumpulkan data dari [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id) dan [djpk.kemenkeu.go.id](http://djpk.kemenkeu.go.id) dari tahun 2011-2021, dikarenakan data yang diambil untuk penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh berdasarkan informasi yang telah tersusun, yaitu melalui catatan, kepustakaan, dokumentasi, atau pribadi seperti mencari di internet dan perpustakaan serta lembaga atau instansi yang diteliti maupun penelitian ataupun kajian ilmiah dan lain-lain yang masih relevan untuk penelitian ini. Dalam hal ini, pengumpulan data sekunder yaitu peneliti mengumpulkan bahan dokumen karena peneliti tidak mengambil data secara langsung tetapi dengan meneliti dan memanfaatkan data yang dihasilkan dari pihak-pihak tertentu.

#### Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan untuk penelitian ini adalah metode analisis kuantitatif, yaitu peneliti akan mengumpulkan data secara sistematis yang terdapat dalam variabel penelitian. Data yang digunakan untuk penelitian ini yaitu data sekunder yang berbentuk data panel yang terdiri dari 6 Kab/Kota dengan rentan waktu dari tahun 2011-2021.

#### Model Analisis

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis data panel untuk mengetahui pengaruh dana pendidikan, dana kesehatan dan infrastruktur terhadap tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kabupaten/Kota Provinsi Gorontalo. Untuk menjelaskan kekuatan dan arah pengaruh beberapa variabel bebas atau variabel penjelas (*independent/explanatory variable*) terhadap satu variabel terikat (*dependent variable*), metode analisis data dalam penelitian ini (dana pendidikan, dana kesehatan dan infrastruktur) menggunakan model regresi berganda atau *Multiple Regression*.

Bentuk umum persamaan dari analisis regresi linear berganda adalah sebagai berikut :

$$TPT_{it} = \beta_0 + \beta_1 DP_{it} + \beta_2 DK_{it} + \beta_3 IF_{it} + \epsilon_{it}$$

Keterangan :

TPT	: Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Gorontalo
$\beta_0$	: Konstanta
$\beta_1 \beta_2 \beta_3$	: Koefisien Regresi
DP	: Dana Pendidikan di Provinsi Gorontalo
DK	: Dana Kesehatan di Provinsi Gorontalo
IF	: Infrastruktur di Provinsi Gorontalo
$\epsilon$	: Error Term
i	: <i>Intersept</i> (Wilaya / Daerah)
t	: <i>Time Series</i> / Tahun

#### HASIL PENELITIAN

##### Hasil Analisis Regresi Data Panel

Setelah melakukan pemilihan model maka selanjutnya kita akan melakukan analisis regresi dengan bantuan software Eviews untuk melihat pengaruh pengeluaran dana pendidikan, dana kesehatan dan dana infrastruktur terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Gorontalo. Hasil estimasi dalam tabel berikut:

**Tabel 2. Hasil Regresi Fixed Effect Model**

Variable	Coefficient	t-Statistic
C	-19.22989	-1.543911 <sup>NS</sup>
LOG(DP?)	1.602531	2.407466 <sup>**</sup>
LOG(DK?)	-0.825863	-1.943086 <sup>*</sup>
LOG(IF?)	0.102813	0.538004 <sup>NS</sup>
Fixed Effects (Cross)		
_BOALEMO—C	-0.159051	
_BONEBOLANGO—C	0.536321	
_GORUT—C	0.209181	
_KABGOR—C	-1.261159	
_KOTAGOR—C	1.737645	
_POHUWATO—C	-1.062936	
R-squared	0.331739	
Adjusted R-squared	0.237948	
S.E. of regression	1.411882	
F-statistic	3.537001	
Prob(F-statistic)	0.002182	

(Sumber: Data diolah Eviews 9, 2023)

Keterangan: \*\*\* Signifikan  $\alpha = 1\%$ , \*\* Signifikan  $\alpha = 5\%$ , \* Signifikan  $\alpha = 10\%$  dan NS = No Signifikan.

Hasil pengujian signifikansi dari pengaruh setiap variabel independen terhadap variabel dependen dapat dianalisis sebagai berikut:

- 1). Pengujian pengaruh pengeluaran dana pendidikan terhadap tingkat pengangguran terbuka  
 Hasil analisis diketahui nilai probabilitas untuk variabel pengeluaran dana pendidikan adalah sebesar 0.0193, jika dibandingkan dengan nilai alpha (0,05) maka nilai probabilitas lebih kecil sehingga H0 ditolak, dengan demikian disimpulkan bahwa pengeluaran dana pendidikan berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka.
- 2). Pengujian pengaruh pengeluaran dana kesehatan terhadap tingkat pengangguran terbuka  
 Hasil analisis diketahui nilai probabilitas untuk variabel pengeluaran dana kesehatan adalah sebesar 0.0570, jika dibandingkan dengan nilai alpha (0,1) maka nilai probabilitas lebih kecil sehingga H0 ditolak., dengan demikian disimpulkan bahwa pengeluaran dana kesehatan berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka.
- 3). Pengujian pengaruh pengeluaran dana infrastruktur terhadap tingkat pengangguran terbuka  
 Hasil analisis diketahui nilai probabilitas untuk variabel pengeluaran dana infrastruktur adalah sebesar 0.5927, jika dibandingkan dengan nilai alpha (0,05) maka nilai probabilitas lebih besar sehingga H0 diterima., dengan demikian disimpulkan bahwa pengeluaran dana infrastruktur tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka.

#### Uji Statistik

Uji signifikansi merupakan prosedur yang digunakan untuk menguji diterima atau ditolaknya (secara statistik) hasil hipotesis nol (H0) dari sampel. Keputusan untuk menolak H0 dibuat berdasarkan nilai uji statistik yang diperoleh dari data yang ada (Gujarati 2003). Uji statistik terdiri dari uji koefisien parsial (uji t), pengujian koefisien regresi secara bersama-sama (uji f) dan uji koefisien determinasi (R<sup>2</sup>).

##### 1. Uji Simultan (Uji-F)

Uji Simultan (Uji F) digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel independen mempunyai pengaruh yang sama terhadap variabel dependen. Pengujian dilakukan menggunakan uji distribusi F, yaitu dengan membandingkan antara nilai kritis F (F tabel) dengan nilai F hitung yang terdapat pada tabel ANOVA. Dalam menguji kesesuaian model untuk mengambil kesimpulan apakah secara bersama-sama variabel independen dapat menggambarkan hubungan variabel dependen maka dilakukan uji f.

F-Statistic	3.537001	<b>Signifikan</b>
Prob(F-Statistic)	0.002182	

(Sumber: Data diolah Eriens 9, 2023)

Hasil regresi memperoleh nilai statistik uji f sebesar 3.537001 dengan nilai probabilitas F statistic sebesar 0.002182, nilai ini lebih kecil dari nilai alpha (0.05). Maka disimpulkan bahwa variabel pengeluaran dana pendidikan, dana kesehatan dan dana infrastruktur secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka.

##### 2. Uji Parsial (Uji-t)

Uji parsial adalah uji yang digunakan untuk menguji kemaknaan koefisien regresi/parsial. Pengujian secara parsial ini digunakan untuk mengetahui pengaruh secara parsial antara variabel bebas dan terikat dengan melihat nilai t pada taraf signifikansi 5%. Hasil pengujian signifikansi dari pengaruh setiap variabel independen terhadap variabel dependen dapat dianalisis sebagai berikut:

- 1). Pengujian pengaruh pengeluaran dana pendidikan terhadap tingkat pengangguran terbuka  
 Hasil analisis diketahui nilai probabilitas untuk variabel pengeluaran dana pendidikan adalah sebesar 0.0193, jika dibandingkan dengan nilai alpha (0,05) maka nilai probabilitas lebih kecil sehingga H0 ditolak, dengan demikian disimpulkan bahwa pengeluaran dana pendidikan berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka.
- 2). Pengujian pengaruh pengeluaran dana kesehatan terhadap tingkat pengangguran terbuka  
 Hasil analisis diketahui nilai probabilitas untuk variabel pengeluaran dana kesehatan adalah sebesar 0.0570, jika dibandingkan dengan nilai alpha (0,1) maka nilai probabilitas lebih kecil sehingga H0 ditolak., dengan demikian disimpulkan bahwa pengeluaran dana kesehatan berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka.
- 3). Pengujian pengaruh pengeluaran dana infrastruktur terhadap tingkat pengangguran terbuka  
 Hasil analisis diketahui nilai probabilitas untuk variabel pengeluaran dana infrastruktur adalah sebesar 0.5927, jika dibandingkan dengan nilai alpha (0,05) maka nilai probabilitas lebih besar sehingga H0 diterima., dengan demikian disimpulkan bahwa pengeluaran dana infrastruktur tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka.

##### 3. Uji Koefisien Determinasi (Adjusted-R<sup>2</sup>)

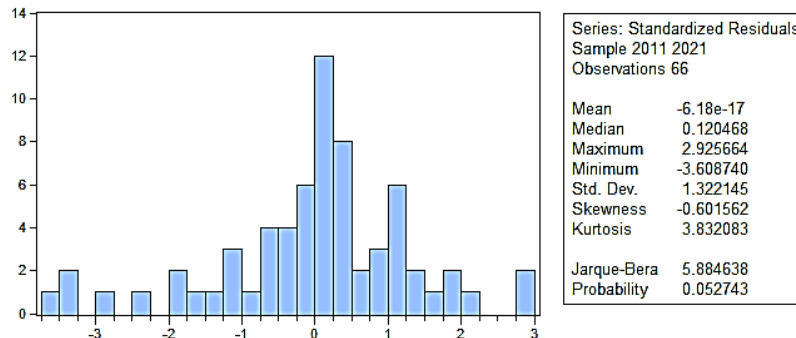
Hasil analisis regresi menunjukkan nilai koefisien determinasi 0.237948 atau sebesar 23,79 persen. Nilai ini menunjukkan bahwa sebesar 24 persen perubahan tingkat pengangguran terbuka selama tahun 2011-2021 dapat dijelaskan oleh variabel pengeluaran dana pendidikan, dana kesehatan dan dana infrastruktur. Sisanya yaitu sebesar 76,21 persen di pengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini.

#### Uji Asumsi Klasik

##### 1 Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui distribusi data, apakah berdistribusi normal atau tidak. Pada penelitian ini uji normalitas menggunakan nilai Jarque-Bera (JB-test).

**Tabel 3. Uji Normalitas**



(Sumber: Data diolah Eriens 9, 2023)

Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai Jarque-Bera sebesar 5,884638 dengan probabilitas sebesar 0,052743 sehingga Prob. Jarque Bera  $0,052743 > 0,05$ , sehingga dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.

### 2 Uji Heteroskedastisitas

Suatu data dapat dikatakan bebas dari masalah heteroskedastisitas apabila nilai probability variabel independen dan dependen lebih besar dari 0,05. Hasil uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini dengan menggunakan metode Glejser adalah sebagai berikut:

**Tabel 4. Uji Heteroskedastisitas**

Dependent Variable: RESABS			
Variable	Coefficient	Std. Error	Prob.
C	8.891162	6.591156	<b>0.1827</b>
LOG(DP)	-0.511473	0.359099	<b>0.1598</b>
LOG(DK)	0.028381	0.248365	<b>0.9094</b>
LOG(IF)	0.201619	0.122155	<b>0.1043</b>

(Sumber: Data diolah Eriens 9, 2023)

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas nilai *p-value* variabel Pengeluaran Dana Pendidikan, Dana Kesehatan dan Dana Infrastruktur menunjukkan nilai probabilitas lebih besar dari tingkat alpha (0,05). Sehingga dapat diasumsikan bahwa model terbebas dari masalah heteroskedastisitas.

### 3 Uji Multikolinieritas

Multikolinieritas merupakan salah satu pelanggaran kondisi ideal yang disebabkan adanya hubungan linear antara variabel regresor. Multikolinieritas bisa dideteksi dengan melihat nilai VIF (*Variance Inflation Factor*). Jika nilai VIF lebih kecil dari 10,00 artinya terbebas dari masalah multikolinieritas. Hasil pengujian asumsi non-multikolinieritas dengan menggunakan E-Views adalah sebagai berikut:

**Tabel 5. Uji Multikolinieritas**

Variable	Coefficient	Uncentered	Centered
	Variance	VIF	VIF
LOG(DP)	0.477136	7669.767	<b>2.383335</b>
LOG(DK)	0.269269	4178.660	<b>2.396181</b>
LOG(IF)	0.067105	982.8700	<b>1.026348</b>

(Sumber: Data diolah Eriens 9, 2023)

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa seluruh variabel bebas yang diamati memiliki nilai VIF < 10. Dengan demikian disimpulkan bahwa dalam data yang dianalisis tidak terjadi gejala multikolinieritas.

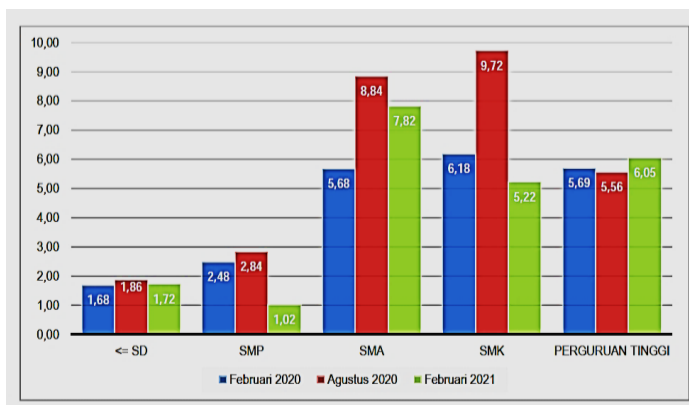
## PEMBAHASAN

### Pengaruh Pengeluaran Dana Pendidikan Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka

Hasil regresi menunjukkan bahwa variabel pengeluaran dana pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Gorontalo. Artinya, peningkatan pengeluaran dana pendidikan akan mempengaruhi tinggi rendahnya pengangguran terbuka di Provinsi Gorontalo. Hal ini membuktikan bahwa realisasi dana pendidikan sudah maksimal dalam mengurangi tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Gorontalo. Pemerintah Provinsi Gorontalo sudah menerapkan program-program seperti sekolah gratis atau yang lebih dikenal wajib sekolah 12 tahun, bantuan operasional sekolah, penyediaan infrastruktur sekolah, semua ini telah dimediasi oleh pemerintah melalui proporsi anggaran yang ditetapkan setiap tahunnya yakni melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Hal ini bertujuan untuk meningkatkan taraf pendidikan dan meningkatkan akses-akses pendidikan bagi masyarakat miskin serta mengurangi pengangguran yang ada di Provinsi Gorontalo. Besar kecilnya pengeluaran pemerintah dibidang pendidikan ini diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik yang maksimal dalam kinerja pendidikan. Secara keseluruhan anggaran untuk bidang pendidikan masih dapat dikatakan minim dibandingkan dengan anggaran sektor-sektor unggulan, selain itu, kinerja dari anggaran pendidikan ini justru menjadi bomerang bagi pemerintah dan tidak tepat sasaran, sehingga menyebabkan pendidikan di Provinsi Gorontalo sangat rendah.



Permasalahan yang timbul dilapangan disebabkan oleh sulitnya memperoleh pekerjaan yang akhirnya justru akan menambah jumlah pengangguran. Masalah pengangguran bukan hanya datang dari penduduk yang berpendidikan rendah. Bahkan sebagian besar pengangguran di Provinsi Gorontalo berasal dari pengangguran terdidik atau pengangguran yang latar belakangnya memiliki tingkat pendidikan yang tinggi. Hal ini didukung oleh data yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik dalam grafik dibawah ini:



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo (BPS)

**Gambar 1 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Pendidikan (%) Tahun 2020-2021**

Gambar diatas menunjukkan bahwa TPT SMA dan TPT Perguruan Tinggi mengalami peningkatan dibandingkan kondisi sebelum pandemi (Februari 2020), sedangkan TPT SMK justru mengalami penurunan. TPT SMA dan TPT Perguruan Tinggi pada Februari 2021 tercatat masing-masing sebesar 7,82 persen dan 6,05 persen, sedangkan pada Februari 2020 tercatat sebesar 5,68 persen dan 5,69 persen. Adapun TPT SMK pada Februari 2021 tercatat sebesar 5,22 persen di mana sebelumnya pada Februari 2020 tercatat sebesar 6,18 persen. Mereka yang berpendidikan SMK memang disiapkan untuk dapat membuka lapangan pekerjaan sendiri dibandingkan dengan tamatan pendidikan SMA dan Perguruan Tinggi. Namun, perlu kajian lebih mendalam untuk menyimpulkan bahwa tamatan pendidikan SMK lebih dapat bertahan atau menyesuaikan diri di masa pandemi dibandingkan dengan mereka yang tamat pendidikan SMA dan Perguruan Tinggi.

Jika dilihat dari pola TPT, mereka yang berpendidikan rendah cenderung mau menerima pekerjaan apa saja tanpa pilah-pilih selama bisa “menyambung hidup”. Sedangkan mereka yang berpendidikan lebih tinggi, selain mencari pekerjaan yang lebih sesuai, mereka juga tidak “terdesak” untuk segera mendapatkan pekerjaan. Hal ini dikarenakan pengangguran terdidik cukup selektif dalam memilih pekerjaan, sehingganya pengangguran terbuka pada pendidikan menengah ke atas jauh lebih tinggi dibandingkan pengangguran terbuka pendidikan rendah.

Semakin banyak pengeluaran dana di bidang pendidikan maka orang dengan tamatan sekolah tinggi juga semakin banyak. Tetapi tidak menjamin bahwa setelah lulus orang itu akan langsung mendapatkan pekerjaan. Dikarenakan kurangnya jumlah lapangan pekerjaan, adanya lapangan pekerjaan tetapi belum sesuai dengan lulusan/keahlian. Menurut (Soni Kurniawan, 2011), alokasi dana pendidikan yang besar tanpa diimbangi alokasi dana dengan tujuan menyerap tenaga kerja lulusan sekolah akan menghasilkan pengangguran terdidik. Semakin tinggi tingkat pendidikan seorang penganggur, maka semakin besar kerugian pemerintah akibat menanggung biaya sekolahnya. Semakin tinggi tingkat pendidikan seorang penganggur semakin besar kerugian sosial yang ditanggung masyarakat akibat pajak yang mereka bayarkan tidak menghasilkan manfaat bagi mereka. Hal ini menunjukkan mahalnya menciptakan pengangguran terdidik. Oleh karena itu proporsi pembagian alokasi dana pembangunan dari APBN dan APBD harus tepat. Terlalu banyak untuk belanja pegawai tidak dapat dibenarkan. Agar dapat mengurangi pengangguran, anggaran penciptaan lapangan kerja harus tumbuh lebih cepat dibanding anggaran pendidikan. Anggaran pendidikan yang lebih besar daripada anggaran untuk menyerap tenaga kerja lulusan sekolah akan menciptakan bottle neck atau hambatan bagi lulusan untuk masuk dunia kerja.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hipotesis dirumuskan sebelumnya, penelitian ini sejalan dengan penelitian (Prawira, 2018). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran di Indonesia selama periode 2011-2015. Hasil penelitian (Iswahyudi Joko) juga menjelaskan bahwa jumlah penduduk yang berpendidikan (dari SD – S1) berpengaruh terhadap jumlah pengangguran. Penelitian yang dilakukan oleh Edy (2009) menganalisis pengaruh pendidikan sumber daya manusia terhadap pengangguran di provinsi Jawa Tengah menyatakan bahwa tingkat pendidikan, dan indeks pembangunan manusia mempengaruhi pengangguran karena seseorang yang memiliki pendidikan tinggi akan cenderung mencari pekerjaan pada daerah propinsi baru, karena hal ini lebih leluasa bersaing di daerah atau propinsi lain yang memiliki leading sektor usaha sesuai dengan pendidikan yang dimilikinya. Variabel tingkat pendidikan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap tingkat pengangguran. berarti bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan akan semakin tinggi tingkat pengangguran. Peningkatan pendidikan ditandai dengan meningkatnya jumlah lulusan SMA/ Aliyah sehingga akan meningkatkan kemampuan tenaga kerja yang akan menambah daya saing tenaga kerja tersebut dan meningkatkan pengangguran.

#### **Pengaruh Pengeluaran Dana Kesehatan Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka**

Hasil regresi menunjukkan bahwa pengeluaran dana kesehatan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengangguran terbuka, artinya peningkatan pengeluaran dana di bidang kesehatan akan mempengaruhi tinggi rendahnya pengangguran terbuka di Provinsi Gorontalo. Hal ini tentunya menarik, mengingat bahwa melalui pengalokasian anggaran untuk bidang kesehatan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik terutama di bidang kesehatan.

Masalah kesehatan ini merupakan faktor penting untuk mengentas kemiskinan dan pengangguran, dikarenakan dengan tingginya tingkat kesehatan maka akan meningkatkan produktifitas penduduk. Pemerintah Provinsi Gorontalo sudah memfasilitasi dan mengeluarkan kebijakan terkait mengurangi pengangguran terbuka, salah satunya yaitu meningkatkan pelayanan kesehatan untuk masyarakat. Program-program kesehatan gratis untuk masyarakat miskin, penyediaan fasilitas kesehatan, transportasi dan

sarana prasarana penunjang kesehatan, semua telah dianggarkan oleh pemerintah melalui belanja bidang kesehatan sebagai upaya untuk menjadikan masyarakat yang sehat, dan membantu masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan di Provinsi Gorontalo.

Pengalokasian anggaran bidang kesehatan ini sudah dijalankan dengan baik dan maksimal sehingga mampu menekan angka pengangguran terbuka di Provinsi Gorontalo. Pemerintah telah memberikan fasilitas kesehatan, transportasi maupun sarana dan prasarana penunjang kesehatan lainnya seperti Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Bersalin, Puskesmas, Klinik/Balai Kesehatan, Posyandu Polindes, pelayanan kesehatan jemaah haji, dan program penguatan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) seperti BPJS/KIS yang digunakan dari realisasi anggaran dibidang kesehatan. Pengalokasian ini membuktikan bahwa pengeluaran bidang kesehatan sudah bisa memberikan sumbangsih terhadap pengurangan pengangguran terbuka secara signifikan. Hal ini mengartikan bahwa sudah ada dampak dalam hal menurunkan angka pengangguran terbuka yang ditandai dengan adanya fasilitas kesehatan dan lapangan kerja di bidang kesehatan yang sudah menjangkau masyarakat secara maksimal.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hipotesis yang menyatakan bahwa pengeluaran dana kesehatan berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka. Penelitian ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh (Militina & Utary, 2017) dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pengeluaran anggaran bidang kesehatan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengangguran terbuka yang disebabkan oleh adanya fasilitas kesehatan yang sudah bisa dirasakan seluruh masyarakat dengan baik, terlebih fasilitas kesehatan gratis yang sangat membantu pengeluaran keluarga miskin.

#### **Pengaruh Pengeluaran Dana Infrastruktur Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka**

Hasil regresi menunjukkan bahwa pengeluaran dana infrastruktur berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap pengangguran terbuka, artinya peningkatan pengeluaran dana di infrastruktur tidak akan mempengaruhi tinggi rendahnya pengangguran terbuka di Provinsi Gorontalo. Menurut Arianto A. Patunru (2007) sebagian besar penganggur di Indonesia memiliki tingkat pendidikan tamat SMA atau lebih tinggi. Presentase penganggur yang memiliki pendidikan tamat SD atau lebih rendah jauh lebih kecil dibanding tamatan SMP ke atas atau SMA keatas. Pemerintah telah membuat program pembangunan infrastruktur guna menyediakan lapangan pekerjaan. Seperti halnya resep dari Keynes dimana akan menyediakan lapangan kerja bagi banyak orang dan pengangguran pun berkurang. Sayangnya kita tak boleh terlalu cepat menyimpulkan apakah program pembangunan infrastruktur cocok dengan karakteristik penganggur seperti ini. Apakah program ini mampu mengurangi pengangguran melalui program pembangunan infrastruktur, seperti pembangunan jalan atau infrastruktur pedesaan sudah menjadi mantera yang dipercaya mayoritas bahwa program infrastruktur akan mampu mengatasi pengangguran, namun secara nyata program tersebut belum mampu mengurangi pengangguran.

Struktur penganggur yang relatif terdidik, muda, masih tinggal bersama orang tua menjadi suatu masalah yang sulit diharapkan dari mayoritas kelompok ini untuk bersedia bekerja di dalam program infrastruktur sebagai buruh konstruksi. Jenis pekerjaan buruh konstruksi seperti itu akan cocok dengan mereka yang tingkat pendidikannya SD atau lebih rendah. Mereka yang memiliki tingkat pendidikan yang relatif tinggi akan sangat enggan untuk masuk ke pasar kerja seperti ini, kecuali jika mereka telah menjadi begitu miskin, dan tak lagi memiliki non-labour income. Artinya, argumen bahwa pembangunan infrastruktur akan menyelesaikan masalah pengangguran, tampaknya hanya benar sebagian. Ia hanya bisa menyediakan lapangan kerja bagi sebagian kelompok penganggur (dengan pendidikan SD kebawah). Proyek infrastruktur mungkin akan bermanfaat untuk menyediakan lapangan kerja bagi mereka yang miskin dan berpendidikan rendah. Program pembangunan infrastruktur mungkin akan menolok program pengentasan kemiskinan, tapi tak sepenuhnya cocok bagi penciptaan lapangan kerja untuk mereka yang berpendidikan, misalnya SMA keatas, yang merupakan porsi terbesar dari kelompok penganggur ini.

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya, akan tetapi penelitian ini sejalan dengan penelitian (Isyah, 2019) dimana hasil penelitiannya menjelaskan bahwa belanja infrastruktur tidak berpengaruh secara langsung terhadap tingkat pengangguran. Penelitian ini juga ditinjau oleh penelitian (Militina & Utary, 2017) dimana hasil penelitiannya menjelaskan bahwa pengeluaran anggaran bidang infrastruktur berpengaruh tidak signifikan terhadap pengangguran terbuka yang disebabkan oleh pembangunan yang hanya terpusat di kota-kota besar. Penelitian penunjang lainnya (M. Yunus Sofian, Ryan Arianda, dan Nurul Janah) dimana hasil penelitiannya menjelaskan bahwa investasi dalam pembangunan infrastruktur membawa pengaruh positif, tetapi tidak terlalu signifikan terhadap kesempatan kerja yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Ini disebabkan oleh pembangunan infrastruktur yang hanya berjalan dalam beberapa waktu saja.

#### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan diatas, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1). Pengeluaran pemerintah bidang pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengangguran terbuka di Provinsi Gorontalo. Artinya setiap kenaikan 1% pengeluaran pemerintah bidang pendidikan akan berpengaruh terhadap peningkatan angka pengangguran sebesar 1,602531 di Provinsi Gorontalo. Tingginya pendidikan seseorang menjadikannya selektif dalam memilih pekerjaan. 2). Pengeluaran pemerintah bidang kesehatan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengangguran terbuka di Provinsi Gorontalo. Artinya setiap kenaikan 1% pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan akan diikuti dengan menurunnya pengangguran terbuka sebesar 0,825863 di Provinsi Gorontalo. Dengan terpenuhinya akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan. Contoh fasilitas kesehatan yang dinikmati masyarakat yakni Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Bersalin, Puskesmas, Klinik/Balai Kesehatan, Posyandu Polindes, pelayanan kesehatan jemaah haji, dan program penguatan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) seperti BPJS/KIS. Realisasi anggaran pengeluaran dibidang kesehatan sudah bisa memberikan sumbangsih terhadap pengurangan pengangguran terbuka di Provinsi Gorontalo. 3) Pengeluaran pemerintah bidang infrastruktur berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap pengangguran terbuka di Provinsi Gorontalo. Artinya setiap kenaikan 1% pengeluaran pemerintah di bidang infrastruktur tidak berpengaruh terhadap tinggi rendahnya angka pengangguran terbuka sebesar 0,102813 di Provinsi Gorontalo. Program infrastruktur yang disediakan oleh pemerintah seperti buruh konstruksi belum memberikan kecocokan terhadap karakteristik pendidikan yang ditamatkan.

#### **SARAN**

Dari hasil analisis dan kesimpulan diatas, maka saran dalam penelitian ini yaitu: 1). Untuk mengurangi angka pengangguran terbuka, pemerintah diharapkan tetap konsisten dalam memanfaatkan pengeluaran dana pendidikan sebaik-baiknya dan juga perlu untuk memperbaharui beberapa kebijakan guna menyediakan lapangan pekerjaan sesuai dengan proporsi pendidikan yang ditamatkan. 2). Pemerintah diharapkan dapat meningkatkan lagi pengeluaran dana dibidang kesehatan agar



pelayanan kesehatan pada masyarakat juga semakin meningkat, menambah fasilitas kesehatan lainnya dan memperluas kesempatan kerja bagi yang berpendidikan kesehatan dan yang bukan berpendidikan di bidang kesehatan. 3). Pembangunan infrastruktur diharapkan dapat mencakup semua kalangan untuk dapat bersinkronisasi dengan penyediaan lapangan pekerjaan dan pembangunan yang merata agar tidak hanya berfokus di pusat kota.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Alisman. (2015). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Aceh Barat. *Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan)*, 3(2), 321-333.
- Althofia, Nalyda Yola. Neli Agustina. (2015). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah untuk Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur terhadap Pdrb dan Penyerapan Tenaga Kerja di Propinsi Jawa Barat Tahun 2012. *Jurnal Aplikasi Statistika Dan Komputasi Statistik*, 7(1), 1-20.
- Andrisani, Elsa. Mike Triani. (2019). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penawaran Tenaga Kerja di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Pembangunan*, 1(3), 907-912.
- Atmaja, Harry Kurniadi. Kasyful Mahalli. (2015). Pengaruh Peningkatan Infrastruktur terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Sibolga. *Jurnal Ekonomi*, 3(4), 1-18.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo (2022). Berita Resmi Statistik : Indikator Ketenagakerjaan di Provinsi Gorontalo 2011-2020.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo (2022). Berita Resmi Statistik: Konsep/Penjelasan Teknis Tenaga Kerja.
- Bastias, Desi Dwi. (2010). Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah atas Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Periode 1969-2009. *Skripsi*. Universitas Diponegoro Semarang.
- Chusna, Arifatul. (2013). Pengaruh Laju Pertumbuhan Sektor Industri, Investasi, dan Upah terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri di Provinsi Jawa Tengah Tahun 1980-2011. *Economics Development Analysis Journal (EDAJ)*, 2(3), 14-23.
- Edy, irwan Christanto. (2009). Analisis Pengaruh Pendidikan Sumber Daya Manusia (SDM) Terhadap Pengangguran Di Propinsi Dati I Propinsi Jawa Tengah. *Jurnal ekonomi bisnis dan perbankan*, 17(4).
- Franita, Riska. (2016). Analisa Pengangguran di Indonesia. *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 1(1), 88-93
- Gozgor, Giray. (2013). The Impact of trade Openness on the Unemployment rate in G7 Countries. *The Journal of International Trade & Economic Development*, 23(7), 1018-1037.
- Jannah, Nurul, Ryan Arianda, M. Yunus Sofian. (2021). Pengaruh Investasi Pemerintah Dalam Bentuk Pembangunan Infrastruktur Terhadap Kesempatan Kerja di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, 2 (4), 83-95.
- Indradewa, I Gusti Agung. Ketut Suardhika Natha. (2015). Pengaruh Inflasi, Pdrb dan Upah Minimum terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Provinsi Bali. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 4 (8), 923-950.
- Iswahyudi Joko, S., Moh.Yamin, D., & Ujiati Suci, R. (N.D.). Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Jumlah Pengangguran Di Kota Semarang.
- Isyah, M. (2019). Pengaruh Belanja Pendidikan, Kesehatan, dan Infrastruktur Terhadap Tingkat Pengangguran Di Kabupaten Barru. *Jurnal Ilmu Ekonomi*.
- Kurniawan, Roby Cahyadi. (2013). Analisis Pengaruh PDRB, UMK, Dan Inflasi terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Malang Tahun 1980-2011. *Skripsi*. Universitas Brawijaya.
- Rachim, Rizka Juita. (2013). Analisis Pengaruh Upah Minimum Provinsi, Pengeluaran Pemerintah, Investasi Swasta dan Jumlah Penduduk terhadap Pengangguran Terbuka di Provinsi Sulawesi Selatan Periode 1996-2010. *Skripsi*. Universitas Hasanuddin Makassar.
- Pratama, Yodan Riza Agung. Lorentino dan Yustirania Septiani. (2020). Analisis Pengaruh Pdrb, Ump, Investasi, dan Penduduk terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Jawa Tengah 2003-2018. *Journal of Economic*, 2(3), 784-797
- Pratiwi, Ni Putu Ambar. I Gusti Bagus Indrajaya. (2019). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Penyerapan Tenaga Kerja serta Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Bali. *Buletin Studi Ekonomi*, 24 (2), 220-233.
- Prawira, Syurifto. (2018). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum Provinsi, dan Tingkat Pendidikan terhadap Pengangguran Terbuka di Indonesia. *Jurnal Ekonomi*, 1(1), 162-168.
- Priastiwati, Dian. (2018). Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Pendidikan, Upah Minimum, dan Pdrb terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Di Provinsi Jawa Tengah. *Skripsi*. Universitas Diponegoro Semarang.
- Sena, Tety Fadhlila. (2011). Variabel Antiseden Organizational Citizenship Behavior (Ocb). *Jurnal Dinamika Manajemen*, 2(1), 70-77.
- Septiani, Nurul. (2019). Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah pada Sektor Pendidikan, Sektor Kesehatan dan Sektor Infrastruktur terhadap Pertumbuhan Ekonomi dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Kabupaten Pringsewu 2010- 2017). *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
- Suaidah, Imarotus dan Hendry Cahyono. (2013). Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Tingkat Pengangguran Di Kabupaten Jombang. *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE)*, 1(3).
- Sugiyono, 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, 2011. *Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Syahputra, Angga. Erfit dan Nurhayani. (2019). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran Pemerintah, Upah Minimum dan Tingkat Pendidikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi-Propinsi di Sumatera. *Jurnal Perspektif Ekonomi Dan Pembangunan Daerah*, 8(2), 95-106.
- Utary, Anis Rachma. Mardiana dan Theresia Militina. (2017). Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah Sektor Pendidikan dan Kesehatan serta Infrastruktur terhadap Tingkat Pengangguran serta Tingkat Kemiskinan. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 13(1), 50-60.